

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adrian, Sutedi. 2011. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- D.A. Tisnaamidjaja, dalam Asep Warlan Yusuf. 1997. *Pranata Pembangunan*. Bandung: Universitas Parahyangan.
- Diraputra, Suparman .A. 2001. *Sistem Hukum dan Kelembagaan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*. Bogor: PKSPL IPB.
- Faisal, Akbar. 2003. *Dimensi Hukum Dalam Pemerintahan Daerah*. Medan: Pustaka Bangsa.
- Hasni, 2008. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Koteks UUPA-UUPR- UUPRH*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jum, Anggriani. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- M. Andre Martin dan F.V. Bhaskara. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya : Karina.
- Ridwan, H.R . 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siswanto, Sunarno. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soejono, dan Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soejono, Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Yunus,Wahid A.M . 2014. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Kencana.
- Zainudin, Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. PeraturanPerundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Negara;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;

Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatra Barat Tahun 2012- 2032;

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010- 2030;

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

C. WEBSITE:

Siska, Dewi Erni. 2015. *Makalah Indonesia sebagai Negara Kepulauan*. <http://www.damandiri.or.id/file/makalah-Indonesia-sebagai-negara-kepulauan,2015/08/20>.

Pemerintah Kota Padang. 2016. *Kota Padang*. <http://padang.go.id/2016/01/09/kota-padang>.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 2013. *Usaha Jasa Pariwisata*. <http://pariwisata.go.id/ada-13-jenis-usaha-pariwisata-menurut-pasal-14-uu-pariwisata-nomor-10-tahun-2009>.